



doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata di Indonesia merupakan suatu “kekuatan militer” dan “kekuatan sosial” sekaligus kegiatan yang meliputi “bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan”.<sup>1</sup>

Hal ini diawali dengan banyaknya pertentangan ideologi politik pada tahun 1950-an antara partai-partai yang dirasakan sangat merugikan, instabilitas politik terus menerus, kemiskinan yang tak kunjung usai, hingga pembangunan yang mandek. Masing-masing berupaya memasarkan bahwa ideologinya adalah yang terbaik untuk sebuah Indonesia merdeka. Sebagai kelanjutan dari masa pergerakan nasional, secara kasar peta ideologi itu mengerucut menjadi tiga: Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme/Sosialisme. Ketiganya juga menemukan perumahannya pada berbagai partai yang cenderung untuk berpecah belah akibat pertentangan para elitnya, sekalipun ideologinya serupa.

Sesudah Pemilu 1955, dengan terbentuknya DPR dan Majelis Konstituante, pertentangan ideologi itu menjadi semakin sengit. Cita-cita Bung Karno untuk menyatukan ketiga ideologi itu mengalami kegagalan total, karena memang merupakan sesuatu yang mustahil, khususnya antara Islam dan Marxisme.

Karena tajamnya pertentangan ideologi dalam Majelis Konstituante untuk merumuskan dasar negara antara Islam dan Pancasila yang tak kunjung menemukan kata sepakat, TNI mengusulkan kepada Presiden

---

<sup>1</sup> Soekarno, *Soekarno dan Politik Di Indonesia*, Duta Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm 389.

cukup besar di samping pertentangan dalam negeri. Hal ini dikarenakan Dwi Fungsi ABRI yang diciptakan tidak diberi batas sampai kapan akan dibubarkan dan sengaja dipelihara untuk mempertahankan status quo untuk kekuasaan Orde Baru.

Selama Orde Baru pula Tentara Nasional Indonesia mempunyai etos komersil di masyarakat. Hal ini dikarenakan baik sebagai institusi milik negara maupun selaku individu, militer Indonesia terlalu jauh keluar dari jalurnya. Perwira-perwira TNI menduduki pos-pos perekonomian penting dalam birokrasi dan menguasai sektor-sektor vital produksi minyak dan perdagangan beras, bahkan kegiatan-kegiatan usaha swasta yang dijalankan tokoh-tokoh militer dapat berkembang luas dan seringkali sulit untuk dikendalikan. Terutama dengan membanjirnya perusahaan-perusahaan kerjasama asing. Selain itu para perwira militer ini juga sangat dekat dengan penguasa pada rezim Orde Baru yakni Soeharto yang juga merupakan seorang Jenderal.<sup>3</sup>

Selain merajalela di bidang ekonomi (bisnis) TNI juga melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, yang merupakan pengejawantahan dari doktrin Dwi Fungsi ABRI tersebut. Adapun alasan yang menyebabkan TNI berpolitik yakni faktor sejarah, faktor rezim yang berkuasa, faktor keamanan (adanya pemberontakan yang berlatar belakang politik) dan faktor ekonomi.

---

<sup>3</sup> Harold Crouch, Op.Cit, hlm 395.

Tapi perlu diingat bahwa keterlibatan yang terlampau jauh kedalam bidang politik ini juga punya konsekuensi logis yang cenderung negatif, baik buat dirinya sendiri maupun secara umum bagi kehidupan berbangsa. Dampak yang ditimbulkan dari TNI berpolitik yakni bisa di manfaatkan oleh penguasa (untuk mengawasi bahkan menyingkirkan lawan-lawan politiknya), bisa membahayakan rakyat dan negara, bersifat otoriter, kuatnya kontrol militer atas sipil, serta terjadinya sistem satu komando.

Setelah 32 tahun perwira-perwira TNI ikut berpolitik di bawah naungan rezim Orde Baru yang sangat menguntungkan mereka sendiri, akhirnya menemukan titik balik sebagai antiklimaks yang cukup berat dihadapi. Dipicu oleh adanya krisis moneter di kawasan Asia yang menyebar mulai dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan terakhir Indonesia. Dari sekian negara yang mengalami krisis ekonomi, Indonesia adalah negara yang paling parah tertimpa krisis tersebut, yaitu dengan anjloknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika yang sangat tajam.<sup>4</sup>

Akhirnya pada Mei 1998 munculah tuntutan reformasi yang digalang oleh 5 tokoh nasional yakni Amin Rais, Megawati Soekarno Putri, KH. Abdurrahman Wahid, Sultan Hamengkubowono X dan Akbar Tanjung serta dukungan penuh dari mahasiswa, rezim Orde Baru pun runtuh. Selain tuntutan dari mahasiswa berupa reformasi segera dituntut mahasiswa juga menuntut agar Dwi Eungsi ABDI dihapus

yang artinya menuntut TNI bersikap sebagai tentara yang profesional (lepas dari kegiatan bisnis, politik dan sebagainya). Dengan lengsernya penguasa Orde Baru yakni Soeharto “kehancuran” Dwi Fungsi ABRI pun semakin terlihat. Dalam komitmen reformasi, TNI juga telah menegaskan akan lebih profesional dan mandiri sebagai alat negara, tidak terlibat dalam politik praktis. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (lihat juga Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri). Dan pada tahun 2002, pimpinan TNI dan Polri dalam Sidang Tahunan MPR 2002 menyatakan akan mengundurkan diri dari DPR dan MPR pada Pemilu 2004.<sup>5</sup>

Setelah pada Pemilu 2004 hak pilih TNI dicabut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pasal 145.<sup>6</sup>

Namun hal ini tidak berlangsung lama, antitesa terhadap profesionalitas TNI kembali mengemuka. Diawali oleh usulan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto agar prajurit TNI diberikan hak pilih pada Pemilu 2009, banyak pro dan kontra yang bermunculan terhadap kembalinya TNI dalam dunia politik. Bagi yang pro menyatakan ikut Pemilu merupakan hak setiap warga negara, termasuk prajurit TNI, sedangkan yang kontra menyatakan tak setuju prajurit TNI ikut Pemilu karena mereka memiliki senjata. Kalau terjadi apa-apa negara

---

<sup>5</sup> [http://www.waspada.co.id/opini/tajuk\\_rencana/artikel.php?article\\_id=74046](http://www.waspada.co.id/opini/tajuk_rencana/artikel.php?article_id=74046). Diakses pada 25-9-2006.

<sup>6</sup> UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

bisa rusuh. Kalau prajurit TNI dibebaskan memilih bisa-bisa terjadi perpecahan.<sup>7</sup>

Anehnya, Wakil Ketua DPR RI Zainal Maarif senada dengan yang pro. Beliau mengatakan kalau tidak diberi hak pilih pada Pemilu 2009 berarti telah terjadi diskriminasi. Jadi, tidak masalah dengan gagasan memberi hak pilih bagi prajurit TNI dalam Pemilu 2009 karena sebagai warga negara wajar apabila mereka pun memiliki dan menggunakan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya dalam Pemilu.<sup>8</sup>

Akan tetapi gagasan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengenai prajurit TNI mempunyai hak pilih pada Pemilu 2009 direspon kontra oleh Wakil Ketua DPR Soetardjo Soejogoeritno.

Soetardjo di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (15/2) menolak TNI menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009. "Karena saya pikir UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu sudah jelas. Jika sampai TNI berpolitik mendukung salah satu partai dan jika terjadi konflik Pemilu, maka Indonesia bisa perang," katanya. Menurut Soetardjo tidak ada jaminan sistem komando TNI tidak akan memaksa anggotanya ketika pemilu untuk memilih partai tertentu. Apalagi solidaritas antar-anggota dan pensiunan TNI itu terbukti sangat kuat dalam sejarah Indonesia. "Hak pilih itu bisa digunakan jika mereka sudah pensiun," katanya. Kalau mau konsisten, katanya, seharusnya semua pihak merujuk kepada UU Nomor 34 Tahun

---

<sup>7</sup> [http://www.waspada.co.id/opini/tajuk\\_rencana/artikel.php?article\\_id=74047](http://www.waspada.co.id/opini/tajuk_rencana/artikel.php?article_id=74047). Diakses pada 25-9-2006.

<sup>8</sup> [http://www.waspada.co.id/opini/tajuk\\_rencana/artikel.php?article\\_id=74048](http://www.waspada.co.id/opini/tajuk_rencana/artikel.php?article_id=74048). Diakses pada 25-9-

2004 tentang TNI, di mana TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Karena hal itu, selain menyalahi aturan juga sangat berbahaya bagi proses demokrasi di Indonesia. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi I DPR Yudhi Crisnandy. "Tidak ada jaminan TNI tidak akan menggunakan kekuatan senjata," kata Yudhi Chrisnandi, politisi dari Partai Golkar. Karena itu Yudhi berharap apa yang diungkapkan Endriartono Sutarto sebagai pendapat pribadi dan bukan kebijakan yang akan ditempuh TNI. Sejauh itu Panglima TNI yang baru Marsekal TNI Djoko Suyanto dalam 'fit and proper test' (uji kelayakan dan kepatutan) di Komisi I DPR RI awal Februari sudah berjanji akan menjadikan TNI profesional dan tidak berpolitik praktis.<sup>9</sup>

Sejarah menunjukkan bahwasanya orang mudalah yang selalu menjadi motor perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Usia muda adalah saat dimana kita dihadapkan pada realitas yang ternyata sangat jauh berbeda dengan yang ada dalam idealisme kita. Dimana orang muda menggugat dunianya, mencoba membenturkan idealisme dan realita untuk mendapatkan suatu sintesa ide yang akan dijadikan landasan untuk mempraksiskannya guna mencapai kehidupan yang lebih baik dan terlebih lagi untuk jaminan masa depan mereka. Dan dinegara dunia ketiga, tipikal orang muda ini menjelma pada diri mahasiswa sebagai orang muda terpelajar dan mempunyai pengetahuan dan energi yang cukup untuk berbuat. Sebagai massa dari kaum intelektual yang menurut John Benda :

---

<sup>9</sup> <http://www.kompas.com/kompas/sampul/0602/16/005621.htm> Diakses pada 15.1.2007

*Intelektual adalah mereka yang selalu mencari kebenaran ilmiah dan berusaha untuk mengpraksiskannya...*<sup>10</sup>

Sebagai sebuah gerakan sosial, gerakan mahasiswa harus mempunyai landasan idealisme yang kuat untuk bisa melakukan perubahan, karena tanpa hal tersebut setiap gerakannya tidak akan mempunyai makna sedikitpun. Tipikal dari gerakan mahasiswa yang telah banyak mewarnai sejarah dunia adalah bahwa gerakan mahasiswa adalah sebuah gerakan masif yang membutuhkan massa yang besar sebagai preassure agar suara yang dibawanya dapat terdengar. Kemampuan mobilisasi massa yang besar inilah yang selalu menjadi mimpi buruk bagi para penguasa di berbagai belahan dunia.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan salah satu gerakan mahasiswa berideologi Islam yang mempunyai keberpihakan terhadap isu publik secara massif dan terukur sebagaimana porsi mahasiswa yang lebih mengedepankan aspek dan idealitas. Disamping itu, hakekat dasar yang di bangun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah membangun *civil movement* yang mengedepankan sentimentasi peradaban yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan hal itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gerakan mahasiswa tentu saja merespon isu-isu publik karena merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan garis kebijakan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebagai gerakan mahasiswa berideologi

Islam yang selalu mempunyai keberpihakan terhadap isu publik, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak hanya merespon permasalahan yang menyangkut sosial dan agama saja, tetapi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah secara kritis mencoba bersikap terhadap masalah lain seperti wacana kembalinya hak pilih TNI pada 2009. Selain itu fungsi kontrol yang diwujudkan dengan merespon issue-isue publik di berbagai media ini juga digariskan didalam misi gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk dapat mewujudkan bangsa yang demokratis dan menegakan nilai-nilai reformasi.

Dibandingkan dengan gerakan mahasiswa Islam lainnya seperti HMI, KAMMI, GMNI, dalam konteks merespon adanya wacana untuk mengembalikan hak politik militer, sepengetahuan penulis, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan gerakan mahasiswa Islam yang paling tanggap dalam merespon kembalinya hak politik militer tersebut. Hal ini dapat dilihat pada saat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengadakan diskusi publik pada 14 Agustus 2006,<sup>11</sup> dimana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengundang gerakan-gerakan Islam lainnya seperti HMI, KAMMI, GMNI dan lain-lainnya.

Dalam merespon isu publik ini (wacana kembalinya hak pilih TNI pada 2009) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang kota Yogyakarta melakukannya dengan berbagai aksi. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang kota Yogyakarta melakukannya dengan mengadakan diskusi

---

11. *Wacana Reformasi: Isu dan Peran Gerakan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta periode*

Masalah adalah suatu pandangan yang berbeda dalam sebuah masyarakat terhadap isu tertentu.

Berdasarkan faktor tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: ***Bagaimana Respon Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta Terhadap Wacana Kembalinya Hak Pilih TNI pada Pemilu 2009?***

### C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.<sup>15</sup> Berdasarkan pada batasan tersebut maka akan dijelaskan batasan-batasan tentang :

1. Teori Gerakan Sosial
  - a. Gerakan Sosial

Secara umum Gerakan Sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Giddens (1993) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama; atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sofian Efendi dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ESD, Jakarta, 1989, hlm 37.

<sup>16</sup> Suharko, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, Averroes Press, Malang, 2006, hlm 1.

Dalam pengertian diatas, gerakan dalam hal ini gerakan sosial diartikan sebagai bentuk resistensi dari kelompok masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Sementara itu, sepanjang sejarah gerakan mengalami pergeseran paradigma. Saat ini banyak aktivis gerakan yang meyakini bahwa sebuah perubahan yang mendasar mutlak membutuhkan tiga syarat yaitu *pertama*, adanya ideologi alternatif, *kedua*, adanya organisasi yang kuat yang akan menjadi penopang dukungan rakyat dan *ketiga*, adanya momentum yang tepat.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Tumer & Kilian (1957) merumuskan gerakan sosial (social movement) sebagai suatu kolektifitas yang berlansung dalam waktu yang agak lama dan mempunyai tujuan mengadakan perubahan atau menentang terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Disamping itu, gerakan sosial memiliki bentuk-bentuk antara lain demonstrasi (aksi massa), opini publik melalui seminar, diskusi, talk show, tulisan-tulisan di media, penyadaran kepada publik dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari gerakan sosial yaitu untuk melakukan kontrol terhadap ketimpangan sosial yang sengaja maupun tidak, terjadi dan berkembang pesat akibat negara yang abai terhadap masa depan rakyatnya.

Masalah utama dari gerakan sosial adalah perjuangan antara pergerakan dan pemegang kekuasaan untuk mengambil (simpati), pemikiran (pendapat umum), dan dukungan yang aktif dari mayoritas

---

<sup>17</sup> Timur Mahardika, *Gerakan Massa; Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm 31.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 34.

massa yang besar, yang akhirnya memegang kekuasaan untuk mempertahankan pemegang status quo maupun menciptakan perubahan.

Dalam upaya memahami dan menjelaskan suatu fenomena, para ahli ilmu sosial telah mengembangkan khasanah pengetahuan dan wacana yang sangat kaya dan terus berkembang hingga kini. Pada dataran teoritis, hal ini telah melahirkan berbagai teori tentang gerakan sosial. Adapun macam-macam teori gerakan sosial beberapa diantaranya yaitu teori tindakan kolektif (*collective action/behavior*), teori nilai tambah (*value added*), teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*), teori proses politik (*political process*), dan teori gerakan sosial baru (*new social movement*).

Mengutip pendapat Rajendra Singh, Prasetyo menyatakan beberapa karakteristik umum dalam Gerakan Sosial Baru<sup>19</sup>

1. Gerakan Sosial Baru menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya mengalami penciutan dan aspek masyarakat sipil tengah digerosoti oleh kemampuan kontrol negara. Karenanya Gerakan Sosial Baru membangkitkan isu pertahanan diri komunitas dan masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatur negara, agen-agen pengawasan dan kontrol sosial. Dalam konteks ini maka medan perjuangannya bisa bergerak melintasi wilayah kerja tradisional dari industri dan pabrik pertanian dan



memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif.

4. Berbeda dengan gerakan sosial klasik, struktur Gerakan Sosial Baru didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak, orientasi, dan oleh heterogenitas basis sosial.

Adapun akibat yang ditimbulkan oleh Gerakan Sosial yaitu untuk memperoleh dan memelihara demokrasi serta membuat masyarakat lebih kritis terhadap permasalahan sosial. Mereka mengizinkan warganegaraanya untuk menentang pusat kekuasaan dan menjadi aktif dalam proses pengambilan keputusan masyarakat, khususnya pada waktu yang normal untuk mengikut sertakan perilaku politik mereka yang tidak efektif sama sekali. Gerakan sosial mengarahkan warganegaraanya dan pendapat umum untuk menghadapi tantangan pemegang kekuasaan dan dan keseluruhan masyarakat bertahan pada kesetiaan dan nilai-nilai universal yang mengganti semua kerugian pada permasalahan sosial. Yang terbaik bagi mereka adalah, mereka menciptakan suatu keseluruhan kekuasaan pada masyarakat, perpindahan kekuatan sosial dan politis dari golongan atas dan institusi ke orang-orang golongan bawah. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu terjadinya suatu perubahan pada sistem pemerintahan

## b. Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa adalah generasi muda yang sedang mengenyam pendidikan tingginya di sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai kelompok orang yang melihat dan merespon lingkungan dengan penuh kearifan, kritis, analisis, penuh tanggung jawab dengan wawasan keilmuan yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Idealisme juga menjadi ciri yang melekat pada mahasiswa.

Ciri-ciri tersebut yang mendasari munculnya gerakan mahasiswa dimanapun adanya. Aktivis mahasiswa yang melakukan gerakannya sebagai wujud dari kepedulian dan keritisan mereka pada kondisi masyarakat yang sedang berlangsung. Gerakan mahasiswa dilakukan untuk mengubah kondisi-kondisi tersebut berdasarkan pandangan yang melandasi gerakannya. Tidak semua mahasiswa adalah aktivis, dalam artian mau ikut melibatkan diri merubah suatu kondisi yang ada dalam masyarakat.

Gerakan mahasiswa adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya.<sup>20</sup> Yang membedakan gerakan mahasiswa dengan gerakan lainnya adalah gerakan mahasiswa tidak terikat kepentingan pada politik praktis, sedangkan gerakan lain biasanya mempunyai kepentingan politik.

---

<sup>20</sup> <http://www.warisan.or.id/berita/arsip/masdel/001.htm> Diakses pada 25.9.2006

Gerakan mahasiswa dapat dipahami sebagai suatu aksi massa yang terkoordinir untuk melakukan suatu perubahan kondisi yang ada berdasarkan pandangan sosial tertentu yang diyakini sebagai dasar dari gerakan. Gerakan mahasiswa dilakukan dengan tanpa adanya *vasted interest* atau kepentingan politik praktis dibaliknya.<sup>21</sup> Gerakan ini hanya merupakan respon kepedulian pada kondisi masyarakat.

Dari perkembangannya yang terjadi hingga saat ini, gerakan mahasiswa tidak bisa dipahami hanya sebatas gerakan massa (dalam aksi protes dan demonstrasi), namun gerakan mahasiswa itu sendiri sudah berkembang menjadi suatu gerakan yang mencoba ikut membangun kesadaran dan melakukan advokasi masyarakat.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa.

Gerakan mahasiswa juga merupakan salah satu yang termasuk dalam gerakan sosial baru, hal ini terlihat jelas dimana gerakan mahasiswa tidak lagi melakukan pergerakan karena masalah ekonomi-material saja, akan tetapi juga terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah apalagi dalam hal kembalinya hak pilih TNI pada 2009. Tentu saja kebijakan tersebut akan menimbulkan protes dari kalangan aktivis mahasiswa, hal ini dikarenakan gerakan mahasiswa merupakan sebagai

---

<sup>21</sup> Skripsi Muhammad Sulhan, *Dinamika Gerakan Mahasiswa di Indonesia. Suatu Tinjauan Mengenai Gerakan Mahasiswa Kontemporer Pasca 1978; Dalam Kerangka Depolitisasi Kampus*,

aktor utama agar Dwi Fungsi ABRI dicabut dalam tuntutan reformasi Mei 1998.

## 2. Militer

### a. Militer Profesional

Militer dalam bahasa Inggris “military” adalah “the soldiers; the army, the armed forces” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara; angkatan darat; angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni darat, udara, laut dan atau marinir).<sup>22</sup>

Peter Blou dan Richard Scoot mendefinisikan militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha organisasi.<sup>23</sup>

Sedangkan Amos Perlmutter mendefinisikan militer adalah suatu profesi sukarela karena tiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hierarki birokrasi.<sup>24</sup>

Menurut Amos Perlmutter ada dua profesionalisme militer adalah pengawasan dan kecakapan (*control and skill*). Peter Blou dan Richard Scoot mengatakan militer dikontrol pada dua tingkat organisasi yaitu :

- a. Berupa satu kelompok rekan-rekan yang mengawasi keserasian internal korps perwira sebagai suatu kelompok profesi dan sosial.

---

<sup>22</sup> Arif Yulianto, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru: Di Tengah Pusaran Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 27.

<sup>23</sup> Skripsi Arif Zaenudin, *Tahapan Implementasi Kebijakan TNI dalam Pencabutan Dwi Fungsi ABRI*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fkipol UINW, 2002, hlm 12

b. Kontrol eksternal dan disiplin berupa jenjang wewenang.

Secara historis, atribut paling penting dari prajurit profesional adalah keberanian dan disiplin. Akan tetapi prajurit profesional zaman ini sekaligus harus dapat menjadi seorang birokrat dan seorang pahlawan. Oleh karena itu, perlu mempelajari kecakapan-kecakapan manajemen modern dan strategi. Konsekuensi apapun yang diciptakannyaterhadap citra positif para prajurit, profesionalisme korporasi militer ternyata telah memperluas horison sosial dan politik militer. Sebagai suatu kelompok profesi ia harus memelihara standar-standar dan nilai-nilai kelompok *Wetlanschung* militer, secara keseluruhan adalah konservatif, proteksionis, dan eksklusif.<sup>25</sup>

Tanggung jawab profesional dan birokrasi lembaga militer agak konvergen. Sebagai seorang profesional, prajurit bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara dalam pengertian profesi "jabatan" sebagai seorang birokrat ia bertanggung jawab kepada kekuasaan. Militer modern adalah korporasi [dalam hal eksklusif (dalam hal hierarki), dan profesional dalam hal misi].<sup>26</sup>

Para pengamat hubungan sipil-militer dalam negeri, seperti Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo mendefinisikan militer berkaitan dengan hubungan masyarakat yaitu TNI sebagai organisasi kekuatan

bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan rakyat. Sedangkan Bagus A. Hardito, membatasi pihak militer ditekankan pada perwira profesional.<sup>27</sup>

Amos Perlmutter mengatakan kurang setujunya organisasi militer sebagai pelaku politik. Juga ukuran struktur internal dan anggaran pembelanjaan bukanlah pekerjaan yang penting dalam menyelidiki rangsangan untuk melakukan intervensi. Seperti yang dibuktikan Willian Thomson, tidak ada ciri-ciri sistem politik yang menunjukkan hubungan dengan dengan frekuensi kup militer yaitu :

1. Mempunyai suatu lembaga militer yang besar.
2. Mempunyai lembaga militer yang relatif besar.
3. Mempunyai suatu lembaga militer yang mantap dan berpengalaman.
4. Mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja pemerintah untuk dinas pertahanan.<sup>28</sup>

Menurut Huntington, tentara modern dibedakan sebelum tahun 1789 oleh statusnya sebagai suatu kelompok korporatisme profesional. Perwira profesional di jaman modern merupakan suatu kelompok sosial yang baru dan mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut :

1. Keahlian (“manajemen kekerasan”).
2. Pertautan ( tanggung jawab kepada masyarakat atau negara)
3. Korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi)
4. Ideologi (“semangat militer”).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Arif Yulianto, Op. Cit, hlm 29.

<sup>28</sup> Arif Zaenudin, Op. Cit, hlm 14.

<sup>29</sup> Lihat Samuel P. Huntington dalam Arif Yulianto, Op. Cit, hlm 60

Ciri-ciri di atas ini dapat dijumpai dalam semua lembaga militer modern baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang.

b. Militer Pretorian

Kita merujuk pada perwira yang campur tangan sebagai prajurit pretorian. Pretorianisme mengacu pada situasi dimana tentara sebagai aktor politik utama yang sangat dominan yang secara langsung menggunakan kekuasaan mereka. Istilah ini diambil dari salah satu contoh campur tangan militer yang terkenal dan termasyur. Pengawal-pengawal pretorian kerajaan Roma telah dibentuk sebagai suatu unit tentara khusus yang bertugas melindungi Maha Raja. Akhirnya mereka juga menggunakan kekuasaan militer mereka untuk menumbangkan Raja dan menguasai Pemilu. Disini dinyatakan bahwa campur tangan para pengawal pretorian adalah tanda-tanda dan sebab-sebab utama jatuhnya kerajaan Roma.<sup>30</sup>

Frederick Mudel Watkins mendefinisikan pretorian suatu kata yang sering dipakai untuk mencitrakan situasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom didalam masyarakat tersebut berkat penggunaan kekuatan aktual atau ancaman penggunaan kekuatan<sup>31</sup>

Perwira pretorian dapat diklasifikasikan sebagai moderator, pengawal dan penguasa.

---

<sup>30</sup> Arif Zaenudin, Op.Cit, hlm 15.

<sup>31</sup> Frederick Mudel Watkins, *Op. Cit* hlm 65

## 1. Moderator Pretorian

“Moderator” pretorian menggunakan hak veto atas keputusan pemerintah dan politik, tanpa menguasai pemerintah itu sendiri. Walaupun pihak sipil yang memerintah, tetapi kekuasaan mereka diawasi oleh militer yang tidak akan menerima supremasi penuh pihak sipil. “Moderator” pretorian sebagai kelompok yang berpengaruh dan terlibat dalam politik. Dalam hubungan mereka dengan pemimpin sipil, kadangkala mereka mengancam akan melakukan kudeta, jika perlu, mereka akan mengadakan satu kudeta penggantian di mana sebuah pemerintahan akan digulingkan dan digantikan oleh sekelompok orang sipil lainnya yang dapat dikuasai dan diterima oleh militer. Apalagi pihak militer telah menyatakan keinginan mereka, maka keputusan terserah kepada pemimpin sipil untuk mematuhi atau mempertimbangkan dengan hati-hati sampai dimana tuntutan itu harus dipenuhi agar mereka dapat mempertahankan kedudukan masing-masing.<sup>32</sup>

Kadangkala “moderator” pretorian ini mengubah kedudukan mereka sebagai pengawal dan pemerintah. Apalagi perwira dianggap sebagai moderator, mereka sebenarnya hampir menguasai pemerintah itu sendiri. Sekumpulan perwira yang telah terlibat dalam politik sebagai perekan, mengancam pemerintahan secara berkesan menghalangi naiknya sebuah pemerintah, atau menggantikan sebuah pemerintah sipil dengan

... dapat melakukan kudeta dan membuat

kekuasaan. Apabila tundakan “modèrator” ini tidak membawa kesan seperti yang diharapkan, yakni bila keputusan mereka terpaksa berulang kali, para perwira itu akan menyimpulkan bahwa hanya ada satu cara untuk memperbaiki keadaan, yaitu dengan cara menguasai pemerintah itu sendiri.<sup>33</sup>

## 2. Pengawal Pretorian

Setelah pengawal pretorian menggulingkan sebuah pemerintahan sipil, umumnya mereka sendiri akan memegang tampuk pemerintahan untuk periode dua hingga empat tahun. Berhubungan dengan tujuan-tujuan pemerintah, mereka biasanya tidak berbeda dari moderator pretorian yang ingin menghalangi perubahan politik dan mempertahankan peraturan politik. Hanya pengawal pretorian yang merasa yakin bahwa sasaran tersebut lebih mudah dicapai apabila mereka sendiri yang menguasai pemerintahan. Perwira militerpun pada umumnya agak enggan untuk menguasai pemerintahan itu sendiri. Pengawal pretorian berbuat demikian sebagian disebabkan kepercayaan bahwa tidak ada pilihan lain karena tidak adanya satu golongan elit yang dapat mempertahankan status quo politik dan ekonomi, atau tanpa kudeta. Kekuasaan akan berpundak ketangan elit politik yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pihak militer.<sup>34</sup>

Semua rezim militer bersifat otoritarian karena mereka meniadakan atau membatasi hak bernpolitik kebebasan dan persaingan

sekurang-kurangnya ampai para perwira tersebut kembali ke markasnya. Walaupun kegiatan organisasi politik kadang-kadang diharamkan secara keseluruhan, rezim mereka kurang bersifat otoritarian (yaitu tertutup dan terbatas) dibanding pretorian pemerintah. Sebagai partai politik, pergerakan kelompok suku, surat kabar dan serikat sekerjanya biasanya dibenarkan untuk bergerak walaupun kegiatan mereka dibatasi. Berhubungan dengan serikat sekerjanya misalnya, pengawal pretorian telah menyiarkan pemimpin yang ada, menghalangi pernyataan mengenai kenaikan gaji, atau melarang aksi pemogokan tanpa melampaui kesatuan itu. Surat kabar yang diterbitkan tidak dibenarkan mengkritik pemerintah ataupun militer.<sup>35</sup>

### 3. Penguasa Pretorian

Penguasa pretorian memberikan perhatian dibidang ekonomi terutama pemulihan kembali kegiatan ekonomi yang sudah beku. Tetapi pemerintah biasanya mempercayai bahwa hal ini tidak dapat dicapai semata-mata berdasarkan pada kebijaksanaan ekonomi dan keuangan saja. Rencana investasi yang teratur dan modernisasi yang berkesan juga dibutuhkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Sebagai penguasa pretorian juga bermaksud melaksanakan perubahan ekonomi yang progresif yang akan meningkatkan taraf kehidupan dan peluang partisipasi golongan miskin. Perubahan tersebut mungkin dapat dicapai melalui pengalihan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang

dalam pemerintahan dan mempunyai potensi untuk mendominasi badan eksekutif.<sup>38</sup>

Sedangkan ada 3 sub-bentuk pretorianisme modern menurut Amos Perlmutter, yaitu: 1) otokrasi; 2) oligarki; 3) otoriter. *Otokrasi* dianggap sebagai bentuk tirani militer yang sederhana, pemerintahan oleh satu orang. Dalam sistem ini, kekuasaan pribadi yang tidak dibatasi terwujud di dalam diri penguasa tertinggi dan sebagai penguasa tertingginya selalu seorang perwira militer. *Sistem oligarki militer*, militer mengacu pada pemerintahan oleh segelintir orang. Badan eksekutif terutama terdiri dari para perwira militer. Di dalam sistem ini, eksekutif utama adalah seorang pensiunan militer yang sekarang menjadi orang sipil atau orang sipil yang dukungannya selalu dari militer. Perbedaan intrinsik satu-satunya antara *oligarkhi militer* dan *otokrasi militer* adalah jumlah penguasa yang memegang kendali pemerintah. Sedangkan *pretorianisme otoriter*, ditandai oleh pemerintah fusionis militer-sipil. Kekuasaan pemerintah, sekalipun secara politis tidak dibatasi, namun merupakan koalisi pemerintah militer dan sipil dengan hanya sedikit atau tidak ada kontrol politik eksteren. Dalam sistem ini hampir seluruhnya terdiri dari tentara, para birokrat, para manajer dan teknokrat yang merembat dukungan dan mobilisasi politik. Mayoritas badan eksekutif militer kemungkinan terdiri dari orang-orang militer atau para pejabat sipil dan kepala pemerintah belum tentu perwira militer. Tetapi pejabat sipil mungkin tidak memiliki kecakapan-kecakapan

militer.<sup>39</sup> Semua sub bentuk-bentuk pretorian militer di atas sumber dukungannya adalah lembaga militer.

### 3. Pemilu

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam dalam Undang-Undang Dasar 45. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmatnya kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara demokrasi dan transparan (keterbukaan).

Didalam pembukaan UUD 1945 pada pokok pikiran ketiga ditegaskan, bahwa negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat. Hal ini dipertegas lagi oleh pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis itu terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan wakil golongan fungsional.

Pada alenia keempat pembukaan UUD 1945 dijelaskan makna daripada permusyawaratan (rakyat) bahwa tiap-tiap keputusan negara harus diambil setelah dilakukan perundingan terlebih dahulu. Dalam hal ini, rakyat memberikan usulan pendapat dan persetujuan melalui wakil-

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 67.

lebih seimbang, dengan memeruntukan peningkatan pelayanan sosial yang dapat dinikmati oleh kelas-kelas bawah, atau keduanya sekaligus. Langkah progresif ini termasuk reformasi tanah dan kredit yang bersifat liberal kepada petani untuk memungkinan mereka membeli tanah disamping menaikkan tingkat gaji minimum, memperluas jaminan sosial, kesehatan, rencana pendidikan, menarik perusahaan swasta menjadi milik negara dan menggunakan peraturan perpajakan secara merata.

Pemerintah jenis ini lebih bersifat rezim otoritarian dibanding jenis pengawasan yang mebatasi diri untuk tidak mendominasi pemerintah. Hampir semua organisasi dan kegiatan politik dan semi politik yang bebas telah diharamkan. Berita surat kabar disaring, disunting dan diterbitkan, oleh mereka yang diangkat oleh mereka. Pada umumnya, penindasan semakin luas. Penguasa pretorian tidak bersedia berkompromi dengan kritik dan penentangan bila dibandingkan dengan pengawas pretorian. Sehingga kelompok pretorian mencoba memobilisasi orang banyak dengan membentuk partai (atau gerakan) massa yang mereka kuasai secara eksklusif. Pola pemerintahan ekonomi dan masyarakat dikendalikan dari atas, pretorian pengasa bukan hanya menjalankan pemerintahan malah menguasai sepenuhnya rezim itu dan kadang kala menyerap dan memobilisir masyarakat dari atas ini dianggap penting demi ambisi pemerintah tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm 20.

publik pada 24 Juli 2006 yang diikuti oleh LSM dan gerakan mahasiswa lainnya seperti HMI, KAMMI, GMNI, LMND<sup>12</sup> dan diskusi internal pada 24 Juli 2006 dan aksi turun ke jalan pada 24 Agustus 2006 dan pada 29 Agustus 2006 yang persertanya adalah anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta.<sup>13</sup>

IMM menilai apabila wacana tersebut disahkan menjadi undang-undang, maka itu sadar atau tidak, otomatis akan mengembalikan Dwi Fungsi ABRI seperti pada pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Selain itu, IMM beranggapan tidak ada jaminan bila prajurit TNI ikut Pemilu tidak bakal terjadi distorsi di lapangan, apalagi ini terkait dengan dunia politik praktis. Apalagi kalau sampai muncul tokoh-tokoh TNI dalam Pemilu 2009, maka suasananya mungkin semakin tidak sehat, karena sistem komando masih terlalu kuat dalam jajaran TNI sehingga bisa saja terjadi pemaksaan oleh atasan kepada bawahan untuk memilih Parpol tertentu. Apalagi solidaritas antar-anggota dan pensiunan TNI hingga kini terbukti masih sangat kuat.

Selain itu, dalam sejarah Pemilu Indonesia suara TNI selalu menjadi rebutan partai politik karena secara kuantitas jumlahnya cukup besar dan secara kualitas loyalitas dan power yang mereka miliki tidak bisa diremehkan. Kalau ini terjadi yang diuntungkan tentunya parpol besar dan biasanya yang dekat dengan pusat kekuasaan dan otomatis yang dekat

---

<sup>12</sup> Laporan Pertanggung Jawaban DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta periode 2003-2006.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Zein Maulana, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang

wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dalam suatu waktu dan menurut cara tertentu. Tindakan melakukan pemilihan inilah yang disebut Pemilihan Umum.<sup>40</sup>

Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>41</sup>

Pengertian dan tujuan Pemilihan Umum dijelaskan didalam pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 :

- 1). Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2). Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur, adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- 3). Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak diseluruh wilayah NKRI.
- 4). Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (4) juga untuk memilih anggota DPR, DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi.
- 5). Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (4) juga untuk mengisi keanggotaan MPR.

---

<sup>40</sup> S.T. Kansil, *Memilih dan Dipilih*, PT. Pradya Pratama, Jakarta, 1986, hlm 15.

<sup>41</sup> Skripsi Agung Kurniawan, *Persepsi Pemilih Pemula Tentang Pemilu*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UMY, 2003, hlm 11-12.

**a. Jujur**

Dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara atau pelaksana, baik Pemerintah dan Partai Politik, Pengawas dan Pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**b. Adil**

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

**c. Langsung**

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

**d. Umum**

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih.

**e. Bebas**

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan apksaan dari siapapun.

**f. Rahasia**

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa

.....

apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.<sup>42</sup>

#### b. Sistem Pemilihan Umum

Konsep yang berkaitan dengan Badan Perwakilan Rakyat (BPR) ialah berupa sistem Pemilu. Hal ini disebabkan salah satu fungsi sistem Pemilu ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota BPR atau menjadi kepala pemerintahan. Dengan demikian mempelajari sistem Pemilu dalam ruang lingkup yang luas, maka akan ditemui suatu sistem-sistem Pemilu yang banyak ragamnya, seperti sistem pemilihan suara terbanyak, sistem pemilihan bertingkat dan mungkin masih banyak lagi sistem Pemilu yang lain. Namun halnya didalam pembahasan pada penelitian ini hanya akan mengacu pada sistem Pemilu yang diterapkan di Indonesia.

Sistem Pemilihan Mekanis dan Sistem Pemilihan Organik :

##### 1. Sistem Pemilihan Mekanis

Pengertian didalam Sistem Pemilihan Mekanis, apabila seseorang yang duduk di lembaga perwakilan dengan melalui Pemilu, maka sifat perwakilan disebut perwakilan politik (political representation).<sup>43</sup>

Secara umum perwakilan semacam ini mempunyai kelemahan  
tipe ini memiliki beberapa adalah orang-orang populer, karena seperti

politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis pemerintah, perekonomian dan sebagainya.

Dalam sistem mekanis, partai-partai mengorganisasikan para pemilih, dan disinilah partai-partai politik berkembang baik menurut sistem satu partai (*one party system*), dua partai (*two party system*) ataupun sistem banyak partai (*multi party system*) seperti yang dianut oleh Liberalisme, Sosialisme, maupun Komunisme. Bedanya, negara-negara Liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antar individual yang bersifat kontratual, sedangkan Sosialisme terutama komunisme mengutamakan totalis kolektif masyarakat, dan mengecilkan peranan individu-individu dalam totalitas kolektif ini.

Sistem Pemilihan Mekanis biasanya dilaksanakan dengan 2 (dua) sistem Pemilu, yaitu :

- a. Sistem Pemilihan Distrik (sistem pemilihan mayoritas atau *single member constituency*)
- b. Sistem Pemilihan Proporsional (sistem perwakilan berimbang atau *multy member constituency*).<sup>44</sup>

Ad. 1. a. Sistem Pemilihan Distrik

Ada dua karakter utama yang membedakan sistem distrik dari sistem-sistem lainnya, yakni :

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm 17.

“mengelabui” rakyat tentang keadaan calon-calonnya, sebab para pemilih akan memilih calon yang dirasanya baik, yaitu orang yang dikenal sepak terjangnya.

Adapun kelemahan dari sistem distrik ini adalah :

- a). Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apabila jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.
- b) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali; dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah besar, Hal ini yang dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan.<sup>46</sup>

Jika dilihat dari beberapa hal diatas, perlu adanya usaha agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Maka diperlukan suatu kondisi masyarakat yang memungkinkan sistem tersebut dapat beroperasi. Kondisi yang umum ini adalah bahwa rakyat telah mencapai tahap kedewasaan tertentu, yang dapat diukur dengan dua tolak ukur yaitu : tingkat kesadaran politik dan tingkat rasionalitas masyarakat.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2004, hlm.

Sebagaimana halnya dengan menggunakan sistem-sistem pemilihan lainnya, pelaksanaan sistem distrik pun, sangat tergantung pada bagaimana demokrasi dipraktekan.<sup>47</sup>

#### Ad. 1 b. Sistem Pemilihan Proposional

Sistem Pemilihan Proposional adalah sistem pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen puast untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan politik yang turut dalam pemilihan sesuai dengan sumbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan.

Sistem perwakilan berimbang atau proposional ini mempunyai satu keuntungan yang besar, yaitu bahwa dia bersifat representatif dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-golongan kecil pun, dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogen sifatnya, umumnya lebih tertarik pada sistem ini, oleh karena dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan.<sup>48</sup>

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh sistem perwakilan berimbang ini adalah :

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus kearah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat : mereka lebih cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang

---

<sup>47</sup> Nazaruddin Syamsudin, Op. Cit, hlm 144.

<sup>48</sup> Miriam Budiardjo, Op.Cit, hlm 179-180.

terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Umumnya sistem dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.

- b. Banyaknya partai mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil. Oleh karena umumnya harus berdasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih. Sistem ini dilaksanakan di negara Belanda, Belgia, Spanyol, dan Indonesia.
- c. Wakil yang dipilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan bahwa dalam pemilihan semacam ini partai lebih menonjol perannya dari pada kepribadian seseorang, hal ini memperkuat kedudukan partai.

## 2. Sistem Pemilihan Organik

Sistem ini memandang rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup yang meliputi :

- a. Persekutuan hidup geologis (berdasarkan keturunan): rumah tangga.
- b. Persekutuan hidup teritorial (berdasarkan tempat tinggal): desa, kota, daerah.
- c. Persekutuan hidup fungsional special : cabang industri.
- d. Persekutuan hidup special : bank, toko, nelayan, pedagang, majikan



mempunyai hak untuk memberikan suaranya atau memilih pada saat tahap pemungutan berlangsung. Warga negara yang tidak terdaftar atau tidak tercatat, dengan sendirinya tidak diperkenankan memberikan suaranya pada saat pemungutan suara berlangsung”.<sup>51</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pendaftaran pemilih adalah merupakan kegiatan dimana warga negara yang telah memenuhi persyaratan pada saat tahap pemungutan suara berlangsung.

Pada umumnya persyaratan-persyaratan itu meliputi status kewarganegaraan, umur, tidak terganggu jiwa atau ingatan, tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang dan tidak sedang menjalani hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu.<sup>52</sup>

#### Ad. 1.b. Kegiatan Pencalonan.

Haryanto mendefinisikan kegiatan pencalonan, adalah merupakan suatu proses dimana warga negara yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, didaftar sebagai orang yang dicalonkan dalam pemilu sebagai wakil rakyat untuk menduduki suatu jabatan publik.<sup>53</sup>

#### Ad. 1.c. Kegiatan Kampanye.

Kampanye adalah merupakan salah satu keegiatan yang diselenggarakan pada tahap sebelum pemungutan suara.

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm 23.

<sup>52</sup> Ibid, hlm 24.

<sup>53</sup> Op.Cit.

Sebagaimana dijelaskan oleh Haryanro yang berkaitan dengan hal diatas adalah “Penetapan hasil Pemilu ini berarti pula menunjukan kontestan yang keluar sebagai pemenang dalam Pemilu tersebut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pemilu merupakan suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakil mereka yang duduk di jabatan pemerintahan, dimana diharapkan para wakil yang dipilih dapat menyalurkan aspirasi mereka dan kebutuhan mereka.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia dengan sistem demokrasi ditambah dengan penduduk kurang lebih 2,4 juta jiwa pemilu merupakan jalan yang terbaik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin demi kepentingan yang terbaik bagi bangsa ini.

#### 4. Respon

Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi. Hubungan dengan derinteraksi bersifat dua arah atau lebih. Respon atau reaksi yang timbul dalam interaksi tidak hanya ditentukan oleh aksi itu, tetapi juga oleh aksi lain. Respon juga ikut menentukan suatu aksi (tepatnya: besarnya aksi juga dipengaruhi oleh besarnya reaksi).<sup>56</sup> Selanjutnya, interaksi sosial akan membangun kesamaan persepsi antar anggota masyarakat, yang kemudian menentukan interpretasi seseorang terhadap suatu fenomena sosial.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Dasar-Dasar Sosiologi*, PT Gramedia, Jakarta, 1992, Hal. 11

Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai dengan perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan politik. Didalam melihat respon, teori persepsi mengasumsikan bahwa perilaku suatu individu ditentukan oleh hubungan antara hal-hal yang diyakininya dengan hal-hal yang diharapkan.<sup>57</sup> Disamping itu, respon seseorang dipengaruhi oleh cara ia melihat, menafsirkan dan menilai lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.

Selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya, apakah situasi baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan, dan lain-lain. Persepsi juga mengandung keyakinan tentang sesuatu yang dianggap benar meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenatannya.

Respon merupakan suatu konstruksi sosial kultural yang terbentuk oleh adanya interaksi antar kelompok atau anggota masyarakat. Dalam kehidupannya yang riil, manusia akan memberikan dukungan yang positif atau negatif terhadap satu sama lain dalam proses interaksi, dimana mereka selalu membentuk perilakunya (D.P. Johnson II, 1986:64).<sup>58</sup>

Ditinjau dari kacamata sosiologi, respon merupakan suatu pola adaptasi baru dari masyarakat terhadap suatu aktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana aktivitas tersebut memiliki imbas atau pengaruh terhadap dirinya maupun orang lain. Respon juga

---

<sup>57</sup> Skripsi Hasyim Ashari, *Respon Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Terhadap Isu Pemeberantasan Korupsi di Indonesia pada Era Reformasi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UMY, 2005, hlm 14.

<sup>58</sup> Skripsi Ristiani Musyarufah, *Respon Masyarakat Terhadap Pendidikan di Pesantren pada Era*

merupakan hasil persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan. Menurut Homenuck, sebagaimana dikutip oleh Sudharto P. Hadi (1997:27), respon mempunyai tiga tipe atau bentuk, yakni : a) Tindakan atau *action*, seperti protes, unjuk rasa atau demonstrasi; b) Sikap dan opini yang terbentuk karena persepsi masyarakat; c) Dampak psikologis, misalnya stres, rasa cemas dan sebagainya.<sup>59</sup> Respon inilah yang nantinya akan mempengaruhi dinamika konflik selanjutnya. Sehingga suasana konfliktual akan tercipta antara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (dalam hal ini berkaitan dengan Undang-Undang yang akan mengembalikan hak pilih TNI pada Pemilu 2009).

#### **D. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batas pengertian konsepsional dalam pembahasan ini adalah:

##### **1. Respon**

Respon yaitu suatu perubahan tindakan dan perubahan kondisi, sikap, nilai, keyakinan dan persepsi tiap individu yang disebabkan oleh stimulus atau ransangan (keadaan) yang diberikan kepadanya.

---

<sup>59</sup> Skripsi Islahul Amal, *Respon Masyarakat Kabupaten Kudus Terhadap Kinerja Pelayanan*

## 2. Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa dapat dipahami sebagai suatu aksi massa yang terkoordinir untuk melakukan suatu perubahan kondisi yang ada berdasarkan pandangan sosial tertentu yang diyakini sebagai dasar dari gerakan. Gerakan ini hanya merupakan respon kepedulian pada kondisi masyarakat.

## 3. Tentara Nasional Indonesia

TNI sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan rakyat.

## 4. Pemilu

Suatu cara atau sarana yang tersedia bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya termasuk memilih presiden dan wakil presiden.

### **E. Definisi Operasional**

Pengertian definisi operasional menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi 1985 : 46 adalah sebagai berikut:

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Adapun cara Gerakan Mahasiswa dalam merespon wacana kembalinya kembali TNI pada 2000 yang muncul yaitu dengan cara:

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>60</sup>

Winarno Surachman berpendapat metodologi adalah pengetahuan tentang bagaimana cara kerja yaitu dengan kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>61</sup> Peneliti deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.

---

<sup>60</sup> Winarno Surachman, *Op. Cit*, hlm 34.

- b. Data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan.

## 2. Unit Analisis

Yang akan dijadikan sebagai unit analisis oleh peneliti dalam pencarian data yaitu organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Yogyakarta, meliputi:

- a. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Yogyakarta.
- b. Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Yogyakarta.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta yaitu dengan mengambil studi kasus IMM. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu :

- a. Penulis tertarik untuk mengetahui respon IMM terhadap wacana kembalinya hak pilih TNI pada 2009.
- b. Sebagai gerakan mahasiswa yang berideologi Islam, IMM tidak hanya terpaku pada isu-isu publik tentang masalah sosial dan agama saja, tetapi pada isu-isu lain seperti wacana kembalinya hak pilih TNI pada 2009.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan obyek

#### a. Interview / wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat teknik ini adalah menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan. Interview atau wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu dengan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Yogyakarta dan saya akan mencoba mewawancarai sekitar 7 orang yaitu masing-masing kepala bidang.

#### b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi dengan materi yang diambil.

### 5. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer: data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan respon Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terhadap wacana kembalinya hak pilih TNI pada 2009.

b. Data sekunder: data yang telah diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai respon IMM terhadap wacana kembalinya hak pilih TNI pada 2009.

## 6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, dalam hal ini maka proses analisa data yang diteliti penyusun menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikan data lalu menganalisa sesuai dengan gejala dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan angka. Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa data adalah: proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi. Analisa data juga bisa diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian.

Dalam teknik ini peneliti mencoba melakukan dengan membuat pengklasifikasian data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang digunakan seperti terdiri dari catatan lapangan, catatan peneliti, dokumentasi berupa laporan, studi pustaka, artikel, wawancara dan sebagainya. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu menyajikan data kemudian menarik kesimpulan, selain itu pula dilakukan siklus antar tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis.

Adapun proses yang dilakukan dalam analisa data ini adalah:

### a. Reduksi Data

Tahap ini meliputi proses manipulasi, integrasi, transformasi data

• Tahap ini meliputi data yang diperoleh. Tahap ini dilakukan dengan

cara antara lain peningkatan dan pengkategorisasian data. Reduksi data membantu mengidentifikasi aspek-aspek penting dari pertanyaan penelitian untuk memfokuskan pengumpulan data dan metode-metode sehingga akhirnya pada suatu kesimpulan.

#### b. Pengorganisasian Data

Merupakan proses penyusunan semua informasi seputar tema-tema tertentu, pengkategorian informasi dalam cakupan yang lebih spesifik dan menyajikan hasilnya dalam beberapa bentuk.

#### c. Interpretasi Data

Proses ini mencakup pembuatan keputusan-keputusan dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian pola-pola dan juga menemukan kecenderungan-kecenderungan. Memberikan penjelasan terhadap aspek-aspek tertentu yang memungkinkan pengembangan beberapa sudut pandang yang lebih tegas untuk menuntun penelitian selanjutnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara umum, penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan dengan lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lainnya. Sehingga pada akhirnya akan membentuk satu

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua mendeskripsikan tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu sendiri. Yang akan dikupas disini adalah sejarah IMM, visi IMM, misi IMM, prinsip IMM, program IMM. Serta mendeskripsikan tentang campur tangan TNI dalam Politik, dari awal keterlibatan hingga dilarangnya TNI berpolitik (dicabutnya Dwi Fungsi ABRI sebagai tuntutan reformasi), sampai adanya wacana keterlibatan kembali TNI dalam politik di era reformasi.

Bab ketiga akan memberikan penjelasan bagaimana respon Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta, terhadap wacana kembalinya hak pilih TNI pada 2009.

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran.